

RISALAH RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017
Waktu : 15.30 – 17.00 WIB
Tempat : Hotel Sari Pan Pacific Jakarta
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
Perihal : Rapat Tindak Lanjut Rapat Terbatas (RATAS) Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sulawesi Tengah

Peserta : Hadir:

- Sekretariat Kabinet;
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
- Kementerian Perhubungan;
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Perwakilan PT Angkasa Pura I.

Tidak Hadir:

- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Kementerian Keuangan;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Kementerian BUMN;
- Kementerian ESDM
- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah;
- PT Pelindo IV

Agenda Rapat : Pembahasan tindak lanjut RATAS PSN di Provinsi Sulawesi Tengah

Pembahasan :

Jalan Palu - Parigi

Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga :

- Bina Marga menyatakan tidak siap dengan pembangunan Jalan Palu-Parigi *bypass*, dan untuk sementara hanya dibatasi dengan kegiatan penanganan rutin dan penanganan lereng pada Jalan Palu – Parigi eksisting.
- Terkait arahan Presiden untuk mematangkan rencana pembangunan Jalan Palu – Parigi *Bypass*, Kementerian PUPR akan menganggarkan untuk reviu desain pada Tahun Anggaran 2018.



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

- Untuk tahun 2017, Kementerian PUPR masih akan berfokus pada pengerjaan Jalan Palu – Parigi eksisting terkait pemeliharaan dan penanganan longsor.

Kemenko Perekonomian:

- Kementerian PUPR diharapkan dapat melaporkan kepastian apakah kegiatan reviu desain Palu-Parigi *Baypass* dapat dilakukan secepatnya pada tahun 2017 atau tetap dimulai pada tahun 2018.

Pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu)

Perwakilan Kementerian Perhubungan:

- Saat ini Pelabuhan Pantoloan telah dioperasikan oleh PT Pelindo IV. Untuk pengembangan pelabuhan lebih lanjut, Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo IV tengah menyusun perjanjian kerjasama pemanfaatan.
- Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan, tidak ada pengembangan untuk Pelabuhan Pantoloan hingga 2019 selain kegiatan reklamasi.

Perwakilan Kantor Staf Presiden:

- Arahan Presiden dalam RATAS adalah terkait kegiatan integrasi pelabuhan dengan KEK Palu. Saat ini MoU kerjasama integrasi Pelabuhan Pantoloan dengan KEK Palu telah ditandatangani antara PT Pelindo IV dengan Walikota Palu.

Kemenko Perekonomian

- Diharapkan sebelum tanggal 23 Juni 2017, Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo IV berkoordinasi lebih lanjut untuk mengkonfirmasi ulang arahan Presiden mengenai penerapan skema KPBU untuk pengembangan Pelabuhan Pantoloan.

Revitalisasi Bandara Mutiara, Palu

Perwakilan Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Udara

- Terkait pengembangan Bandara Mutiara SIS Al-Jufri menjadi bandara internasional dan bandara embarkasi haji, saat ini sedang dilaksanakan evaluasi terhadap potensi pengembangan bandara dan kajian teknis rencana pengembangan bandara. Selain itu, rencana pengembangan bandara embarkasi haji juga tengah dibahas bersama Kementerian Agama untuk diperoleh rekomendasi dari Kementerian Agama.
- Kementerian Perhubungan akan mengkonfirmasi *timeline* dari pengembangan proyek, termasuk target perolehan rekomendasi dari Kementerian Agama yang diharapkan dapat diperoleh pada awal Agustus 2017.
- Unit Pelayanan Bandara Mutiara saat ini telah berbentuk Badan Layanan Umum. Selanjutnya, akan diaplikasikan pola Kerjasama Operasi (KSO) dan Kerjasama Manajemen (KSM) dengan PT Angkasa Pura I.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu

Bappeda Sulawesi Tengah

- Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada BUMD pengelola KEK Palu diperkirakan dapat selesai pada bulan Juli 2017.



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

- Badan Pengelola KEK telah ditetapkan yaitu PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (PT BPS).

Dewan KEK:

- Saat ini sedang dalam proses penyusunan prastudi kelayakan atau *Outline Business Case* (OBC).
- Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah baik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPR.
- Pengembangan Kawasan KEK saat ini seluas 110 ha tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan, namun Dewan KEK tetap akan melakukan pemeriksaan ulang.

Kemenko Perekonomian:

- Dewan KEK dan Kementerian LHK dibantu oleh KPPIP akan mengecek dan mengkonfirmasi ulang isu adanya potensi tumpang tindih dengan kawasan hutan, baik pada rencana pengembangan KEK seluas 1.500 Ha maupun pada kawasan yang telah terbebaskan seluas 110 Ha.

Program Ketenagalistrikan

Kemenko Perekonomian:

- Karena perwakilan Kementerian ESDM tidak hadir, Kemenko Perekonomian dibantu KPPIP akan mengkonfirmasi isu dan tindak lanjut arahan presiden ke Kementerian ESDM.



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

Tindak Lanjut:

No	Proyek	Tindak Lanjut	Pelaksana	Target Pelaksanaan
1	Jalan Palu - Parigi (39km)	Kementerian PUPR melaporkan kepastian apakah kegiatan reviu desain dapat dilakukan secepatnya pada tahun 2017 atau tetap dimulai pada tahun 2018	Kementerian PUPR	23 Juni 2017
2.	Pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu)	Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan PT Pelindo IV untuk mengkonfirmasi ulang arahan presiden tersebut	Kemenhub dan PT Pelindo IV	23 Juni 2017
3.	Revitalisasi Bandara Mutiara, Palu	Kementerian Perhubungan mengkonfirmasi <i>timeline</i> dari pengembangan proyek, termasuk target diperolehnya rekomendasi dari Kementerian Agama.	Kemenhub	<i>Kementerian Perhubungan akan memutuskan rencana pengembangan pada awal Agustus</i>
4.	KEK Palu	Dewan KEK dan Kementerian LHK (dibantu KPPIP) akan mengecek dan mengkonfirmasi ulang isu adanya potensi tumpang tindih dengan kawasan hutan	Dewan KEK dan Kementerian LHK	23 Juni 2017
5.	Program Ketenagalistrikan	Karena perwakilan Kementerian ESDM tidak hadir, KPPIP akan mengkonfirmasi isu ini ke Kementerian ESDM	KPIP dan Kementerian ESDM	23 Juni 2017